

PERAN STRATEGIS KELAS MENENGAH DALAM PILKADA

Oleh: Setyo Utomo

ABSTRAK

Dalam catatan sejarah keberadaan kelas menengah di masyarakat sering mempengaruhi proses perubahan sosial dan politik, baik di dalam maupun di luar negeri. Sejarah revolusi Perancis yang di tandai dengan adanya revolusi Industri menandai perubahan social yang terjadi pada masyarakat Eropa yang di motori oleh kelas menengah. Sejarah di Indonesia juga menunjukkan posisi kaum menengah menempati posisi sentral dalam menentukan proses perubahan sosial di tengah masyarakat, mulai era kemerdekaan, transisi dari orde lama ke orde baru hingga terjadinya reformasi 98 yang di motori oleh kelas menengah yaitu tokoh masyarakat dan mahasiswa. Dalam konteks pilkada kelas menengah di Indonesia juga selalu menjadi faktor penentu dalam mewarnai proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah, baik secara kualitas pelaksanaan demokrasi di tingkat local (pilkada) maupun dalam mempengaruhi masyarakat pemilih untuk menentukan pilihannya dalam memilih pemimpin pemerintahan di daerahnya.

Kata kunci: kelas menengah, Kepala daerah, Pilkada

In note of history of existence of middle-weight in society often influence process of political and social change, either in in and also beyond the sea. History of French revolution which is in marking with existence of Industrial revolution mark change of social that happened at society of Europe which is in motorizing by middle-weight. History in Indonesia also show position of middle clan take possession of central position in menentukan process social change in the middle of society, start independence era, transition from old order to new order till the happening of reform 98 which is in motorizing by middle-weight that is elite figure and mahasiswa. Dalam of context of pilkada of middle-weight in Indonesia also always become determinant in colouring process of execution of regional leader election, either through quality of execution democratize in storey; level local (pilkada) and also in influencing society of elector to take choice its in chosening leader of governance in area

Keyword: middle-weight, Regional leader, Pilkada

Perkembangan indeks demokrasi di Indonesia mulai dari tahun 1999 hingga 2017 selalu menunjukkan grafik peningkatan. Sejak 2009 tercatat bahwa indeks demokrasi Indonesia mencapai 67,60 %, kemudian mengalami penurunan menjadi 65,48 % pada tahun 2011-2013 dan kembali meningkat tajam tahun 2014-2015 mencapai 73,04 % (BPS, 2015).

Tahun 2017 Indonesia kembali sukses menuliskan sejarah baru penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung dengan system one man one vote. Hal ini semakin memantapkan Indonesia sebagai salah satu Negara demokratis dunia yang telah menyelenggarakan system pemilihan secara langsung.

Di balik hingar bingarnya pesta demokrasi local, ada satu hal yang luput dari perhatian, yaitu peran kelas menengah dalam memeriahkan pesta demokrasi lima tahunan. Berdasarkan data Bank Dunia, jumlah kelas menengah di Indonesia pada tahun 2010 berada pada kisaran 134 juta jiwa (56,6 %), meningkat signifikan dari tahun 2003 yang hanya 37,7 % (WWW.Kompas.Com 19 November 2013).

Dari data di atas dalam kontestasi demokrasi seperti pemilihan kepala daerah, kelas sosial menengah masyarakat sebenarnya mempunyai peran strategis dalam menentukan kualitas pemilihan kepala daerah (pilkada) sekaligus mempengaruhi peta dukungan dan peta politik bagi kandidat. Dengan fleksibilitas yang dimiliki, kelompok menengah masyarakat memegang faktor kunci untuk menentukan hasil dan proses pilkada. Di satu sisi keberadaan kelompok menengah mampu mempengaruhi keputusan politik yang diambil oleh elite politik dan pada saat yang sama kelompok menengah ini juga dapat dengan mudah masuk ke basis mempengaruhi masyarakat pemilih.

Kepentingan memang hal yang sulit di hindari dari manusia sebagai zoon politicon (makhluk social politik). Politik adalah esensi hidup manusia dimana ia memperjuangkan dan mempertahankan kepentingannya. Baik kepentingan atas keadilan, kesehatan, keamanan serta berbagai kepentingan fundamental lainnya.

Pemenuhan ini menjadi keniscayaan bagi individu-individu kelas menengah untuk mempertahankan sekaligus menegaskan keberadaannya. Maka hal yang lazim dan bisa dipahami jika kelas menengah sangat antusias dalam menyambut momentum Pemilihan Umum Kepala Daerah (pemilukada). Sebagai upaya untuk mewujudkan cita-cita politiknya sekaligus pemenuhan kepentingan politik, ekonomi maupun kesejahteraan.

Sejarah Perubahan Sosial Oleh Kelas Menengah

Dalam catatan sejarah keberadaan kelompok menengah di masyarakat sering mempengaruhi proses perubahan sosial dan politik, baik di dalam maupun di luar negeri.

Seperti yang terjadi dalam sejarah revolusi perancis, dimana kelas menengah yang saat itu lazim disebut kaum *borjuis*, berhasil mengkonsolidasikan kekuatan dengan menggulingkan pemerintahan monarki yang dikuasai oleh kaum aristokrat di bawah kepemimpinan Monarki Louis XVI. Atas nama kesetaraan, semangat pembebasan dan persaudaraan kelas menengah masyarakat waktu itu mampu menghimpun kekuatan yang berujung pada runtuhnya kekuasaan raja.

Sejarah bangsa Indonesia juga menunjukkan posisi kaum menengah menempati posisi yang sentral dalam menentukan proses perubahan sosial di tengah masyarakat. Proses ini ditandai dengan semangat perlawanan terhadap praktik penjajahan yang dilakukan oleh imperialisme Belanda. Ir. Soekarno, Muhammad Hatta, Sutan Syahrir dan para pejuang lainnya tampil ke permukaan mewakili kelompok menengah sosial masyarakat untuk menentang rezim penjajah. Mereka semua adalah kelompok intelektual muda yang sempat mengenyam pendidikan baik di Indonesia hingga ke Belanda. Kekuatan intelektual ini bertemu dengan kekuatan sosial di masyarakat seperti kelompok Sarekat Islam (SI) yang dikomandani oleh HOS Cokroaminoto, kemudian menghimpun kekuatan bersama-sama dengan mengorganisir tokoh masyarakat dan tokoh pemuda di berbagai daerah yang akhirnya dapat bersatu melawan penjajahan imperialisme Belanda

Bahkan gerakan reformasi 98 yang menuntut semangat demokratisasi dan keterbukaan, juga di motori oleh kelas menengah yang mempunyai kesadaran politik untuk melakukan semangat perubahan dari rezim otoriter ke pemerintahan yang lebih demokratis. Gerakan mahasiswa, akademisi bersatu padu dengan kekuatan organisasi masyarakat (ormas) dan organisasi keagamaan, yang di motori oleh tokoh-tokoh ormas waktu itu, seperti Gusdur (KH. Adurrahman Wahid) yang mewakili Ormas Islam terbesar di Indonesia, Prof. Dr. Amien Rais, Akademisi sekaligus ketua umum PP Muhammadiyah, Megawati representasi kaum nasionalis sekaligus dari unsur Parpol yang terpinggirkan secara kekuasaan, dan kekuatan cultural rakyat yang di wakili oleh Sri Sultan Hamengkubowono X berhasil mengawal proses transisi reformasi yang di tandai dengan perubahan sistem politik, sistem sosial dan pemerintahan, hingga lahirnya system Pemerintahan daerah di era otonomi daerah seperti saat ini

Dari berbagai peristiwa di atas menunjukkan, kesadaran kolektif kelompok menengah sosial masyarakat mampu menggerakkan proses terjadinya perubahan sosial di masyarakat, dari rezim pemerintah yang otoriter ke system pemerintahan yang lebih demokratis .

Membangun Partisipasi Publik Dalam Pilkada

Menurut Miriam Budiardjo (2013: 367) Partisipasi masyarakat dalam politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam praktik dan kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin negara, dalam hal ini memilih kepala daerah baik secara langsung maupun tidak langsung ikut mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti: Memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (contracting) atau lobbying dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan social dengan direct actionnya dan sebagainya.

Masyarakat merupakan faktor sentral dalam suatu Negara yang menganut paham

demokrasi. Tanpa adanya partisipasi masyarakat demokrasi tidak dapat diwujudkan, karena hakekat demokrasi adalah, dari, oleh dan untuk rakyat.

Partisipasi politik masyarakat secara kritis dan konstruktif sangat menentukan bagi kelanjutan system demokrasi yang menghasilkan kemajuan. Masyarakat harus dipersiapkan agar dapat berpartisipasi secara positif. Peran kelas menengah disini sangat diperlukan untuk memberikan pencerahan tentang panggilan kepada masyarakat untuk turut bersama-sama terlibat aktif dalam pilkada.

Strategi Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat

Untuk menyukseskan pembangunan di daerah, peranan dan partisipasi masyarakat merupakan keniscayaan. Dapat dikatakan sukses atau tidaknya pelaksanaan pembangunan di daerah sangat di tentukan besar kecilnya peranan dan partisipasi masyarakat, termasuk dalam mengawal pelaksanaan pilkada. Semakin besar peran dan partisipasi masyarakat, semakin besar peluang suksesnya pembangunan, begitu pula sebaliknya, semakin kecil tingkat partisipasi masyarakat tingkat keberhasilan pembangunan juga semakin kecil.

Peran masyarakat dalam pemilu (pemilihan legislatif, pemilihan presiden dan pemilukada) merupakan faktor yang sangat penting, karena salah satu indicator keberhasilan pemilu adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Pemilu merupakan mekanisme politik penting yang menandai implementasi kedaulatan rakyat. Negara yang berkedaulatan rakyat akan menyelenggarakan pemilu sesuai ketentuan yang berlaku untuk melembagakan system demokrasi. Pemilu digelar dengan mekanisme dan system yang menjamin adanya keadilan, kesamaan hak, transparansi, berkesinambungan dan akuntabilitas.

Untuk mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pilkada di perlukan strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Adapun strategi untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat

menurut Saiful Arif (Averous 2012) dapat dilakukan melalui:

1. Pendidikan politik

Tanggungjawab pendidikan politik masyarakat untuk membangun kesadaran dan partisipasi politik warga sebenarnya adalah tugas segenap stakeholder politik. Namun yang paling utama adalah tugas partai politik, sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan dukungan dan partisipasi masyarakat, karena masyarakat merupakan sumber dukungan suara bagi eksistensi partai politik. Sehingga upaya untuk membangun kesadaran masyarakat dalam berpolitik niscaya dilakukan oleh parpol. Pendidikan politik yang sehat menjadi kata kunci tingkat pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam politik.

Melalui pendidikan politik akan terjadi proses interaksi timbal balik antara partai politik dengan konstituen. Dari sini akan terjadi proses transformasi, sehingga masyarakat mendapatkan pencerahan, yaitu masyarakat belajar dan memahami mekanisme, sistem, struktur dan cara kerja partai dan kedudukan partai dalam sistem bernegara. Dari sini masyarakat juga akan memahami tanggungjawab dan hak-haknya sebagai warga negara.

Rakyat adalah pemilik kedaulatan tertinggi dalam memilih pemimpin yang dianggap kompeten dalam memenuhi hak-haknya dalam memajukan masyarakat. Kewajiban partai politik dalam memberikan pendidikan politik bagi rakyat sebenarnya telah menjadi amanah Undang-undang, yaitu pasal 31 UU Nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik. Dimana didalamnya menyatakan bahwa, partai politik berkewajiban melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai ruang lingkup tanggungjawabnya dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender dan tujuannya antara lain, meningkatkan kesadaran, hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat, meningkatkan kemandirian,

kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam rangka membangun kesatuan dan persatuan bangsa

2. Memaksimalkan fungsi partai politik

Miriam Budiardjo (2013: 405-409) menyatakan bahwa partai politik memiliki fungsi:

a. Sarana komunikasi politik

Menurut Anwar Arifin (2011: 1) komunikasi politik adalah pembicaraan untuk mempengaruhi dalam kehidupan bernegara. Komunikasi politik dapat pula mendesign apa yang mungkin (art of possible) dan bahkan merupakan seni yang dapat mendisain hal yang tidak mungkin menjadi mungkin (art of impossible). Sementara secara umum komunikasi politik dipahami sebagai proses penyampaian informasi politik dari partai/pemerintah kepada masyarakat dan sebaliknya dari masyarakat kepada partai/pemerintah. Karna parpol berfungsi sebagai wadah untuk menyerap aspirasi masyarakat yang akan di rumuskan dalam kebijakan legislasi bersama dengan pemerintah

b. Sosialisasi Politik (political socialisation)

Adalah suatu proses yang melaluinya seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang umumnya sedang berlaku dimana ia berada. Ia adalah bagian dari proses yang menentukan sikap politik seseorang, misalnya mengenai nasionalisme, kelas sosial, suku bangsa, ideologi, hak dan kewajiban. Dimensi lain dari sosialisasi politik adalah sebagai proses yang melaluinya masyarakat menyampaikan budaya politik, yaitu norma-norma dan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Dengan demikian sosialisasi politik merupakan faktor penting dari terbentuknya budaya politik (political culture) suatu bangsa. Proses sosialisasi berjalan seumur hidup, terutama dalam masa kanak-kanak. Ia berkembang melalui keluarga, sekolah, peer group, tempat kerja, pengalaman sebagai orang dewasa, organisasi keagamaan dan partai politik, Ia juga

menjadi penghubung yang mensosialisasikan nilai-nilai politik generasi satu ke generasi yang lain.

Pelaksanaan sosialisasi politik dilakukan melalui berbagai cara yaitu media massa, ceramah-ceramah, kursus kader, penerangan, penataran dan sebagainya.

Sosialisasi dilakukan oleh parpol kepada masyarakat berupa pengenalan program-program dari partai tersebut. Dengan demikian diharapkan masyarakat dapat memilih parpol tersebut pada pemilihan umum. Ide, visi dan kebijakan strategis yang menjadi pilihan parpol di masyarakatkan kepada konstituen untuk mendapatkan *feedback* berupa dukungan dari masyarakat luas. Partai menjadi struktur antara atau “intermediate structure” yang harus memainkan peran dalam membumikan cita-cita kenegaraan dalam kesadaran kolektif masyarakat warga negara

c. Sarana Rekrutmen Politik (Political Recruitment)

Fungsi ini berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas.

3. Memaksimalkan sosialisasi oleh penyelenggara pemilu, maka sosialisasi menjadi ujung tombak baik melalui seminar, sarasehan, dialog dan lain-lain untuk membangun kesadaran public dalam pilkada. (Saiful Arif, Partisipasi, Demokrasi dan Pembangunan dalam Partisipasi Warga Dalam Pembangunan dan Demokrasi, Averoes Press, Malang, 2012)

Merumuskan Isu Strategis Dalam Pilkada

Melalui pilkada kelas menengah dapat berupaya membangun politik yang sehat, yaitu politik yang menjadi jembatan untuk menciptakan peradaban yang baik untuk membangun dan memajukan masyarakat di daerah.

Dalam pembangunan secara garis besar setidaknya dapat di bagi menjadi lima

bagian. **Pertama**, pembangunan fisik sarana prasarana seperti pembangunan jala, jembatan, perumahan, sekolah, pasar dan lain-lain.

Kedua, pembangunan sosial masyarakat seperti, pendidikan, kesehatan, sector labor (tenaga kerja) dan sebagainya

Ketiga, pembangunan ekonomi, seperti perdagangan, pertanian, peternakan, industry kreatif dan sebagainya

Keempat, pembangunan keagamaan seperti membangun sarana ibadah, pendidikan agama, kerukunan umat beragama dan lainnya

Kelima, pembangunan politik seperti membangun kesadaran bela negara, cinta tanah air, deteksi dini untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Partisipasi politik dalam pilkada dan pemilu lainnya.

Dari kelima aspek diatas Pilkada setidaknya dapat memiliki makna strategis bagi masyarakat pemilih untuk menentukan pembangunan di daerah. Koreksi, harapan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah menjadi dasar pijakan masyarakat untuk memilih langsung calon pemimpin daerah, yang dianggap mempunyai kompetensi dan kemampuan untuk melakukan percepatan pembangunan di daerahnya. Baik pembangunan fisik sarana prasarana, pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas serta peningkatan perkonomian masyarakat.

Dalam konteks ini publik (masyarakat) harus mendapat pencerahan melalui distribusi informasi yang cukup mengenai proses, tujuan dan visi-misi calon kepala daerah yang akan mewakili masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Masyarakat pemilih harus mengetahui figur kandidat, tentang track record dan kompetensi serta arah pembangunan daerah dari setiap pasangan calon. Sehingga pemilih lebih mudah menentukan pilihan terhadap kandidat yang dianggap memenuhi kebutuhan aspirasi masyarakat.

Kelompok sosial menengah sebenarnya mempunyai peranan penting dalam rangka

membangun kesadaran politik warga melalui sosialisasi dan transformasi informasi seputar pilkada untuk membuat proses pilkada menjadi lebih berkualitas. Mereka harus proaktif membuka ruang dialog dengan membuat diskusi publik yang lebih luas melibatkan masyarakat, agar masyarakat mampu mendapatkan informasi yang utuh mengenai proses pelaksanaan pilkada. Dalam konteks kekinian kelompok menengah di masyarakat dapat diwakili (representasi) dari kelompok kritis masyarakat seperti kalangan Perguruan Tinggi di daerah, mahasiswa dan akademisi, kelompok organisasi masyarakat baik organisasi keagamaan maupun organisasi kemasyarakatan, Tokoh adat, media massa dan Lembaga swadaya Masyarakat serta kelompok kritis lainnya. Kelompok menengah ini sebenarnya memiliki fungsi strategis untuk mengawal proses pelaksanaan pilkada.

Pilkada sebagai proses demokratisasi politik dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah memberikan peluang bagi masyarakat, bahwa kekuasaan di tangan rakyat dan ditentukan oleh rakyat. Sehingga harus ada kesadaran kolektif dari seluruh masyarakat termasuk kelas menengah masyarakat untuk merespon pilkada sebagai proses yang sangat menentukan dalam pembangunan daerah

Selain melakukan sosialisasi dan penguatan ke masyarakat pemilih, kelompok menengah juga mempunyai peran efektif untuk mendorong elite politik, baik tokoh partai politik di daerah maupun kandidat agar lebih mengedepankan kampanye dialogis, dengan mengedepankan penyampaian visi misi dan program dalam membangun daerah.

Kalangan akademisi, LSM, Ormas dan Lembaga Adat dapat menggelar diskusi publik dengan mengundang para kandidat atau pasangan calon untuk menyampaikan gagasan dan program kerja mereka dalam pembangunan.

Melalui penyampaian program dan visi misi ini dapat diketahui kandidat mana yang mempunyai komitmen dan kesiapan dalam melakukan percepatan pembangunan di daerah.

Selain penyampaian program kerja dan visi misi, melalui forum seminar dan diskusi publik juga dapat disampaikan permasalahan-permasalahan krusial yang masih terjadi di daerah dan menuntut adanya solusi kebijakan yang tepat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada calon yang maju di pilkada.

Banyak isu strategis yang dapat dimunculkan oleh masyarakat terhadap pasangan calon, terutama soal pelayanan dasar yang berkaitan dengan masyarakat luas, seperti pelayanan administrasi umum seperti pembuatan KTP, KK, akte kelahiran dan layanan administrasi kependudukan lainnya yang selama ini dianggap berbelit dan membutuhkan waktu lama. Selain itu pelayanan dasar lainnya seperti pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan serta peningkatan kesejahteraan melalui kebijakan perekonomian serta peningkatan pembangunan sarana prasarana di masyarakat.

Beberapa layanan dasar tersebut dapat dijadikan isu sentral yang perlu di munculkan kelompok masyarakat, karena berkaitan dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat luas. Masyarakat seharusnya memiliki kesadaran akan hak-haknya, bahwa mereka berhak atas kualitas layanan pendidikan, pelayanan kesehatan yang baik, proses layanan administrasi yang cepat dan tidak berbelit. Dan menjadi keharusan bagi pemerintah untuk menyediakan pelayanan dasar yang baik bagi setiap warga masyarakatnya. Pelayanan cepat dan berkualitas sangat mungkin dilakukan oleh pemerintah, karena pemerintah mempunyai seperangkat sumberdaya, yang mampu mewujudkan layanan berkualitas kepada setiap warga di daerahnya. Keberadaan pemerintah yang memiliki kewenangan dan kekuasaan serta didukung oleh keberadaan sumber daya manusia (staf dan aparatur pemerintahan), sumberdaya finansial berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sudah seharusnya digunakan untuk memberikan pelayanan maksimal bagi warga masyarakatnya.

Dengan diangkatnya isu-isu strategis dalam pilkada, kehadiran kelompok menengah dengan sendirinya telah merepresentasikan

sikap, pemikiran dan aspirasi masyarakat umum terhadap proses pelaksanaan pilkada.

Dari proses di atas akan terbangun kesadaran kolektif di tengah masyarakat, bahwa pilkada harus menghasilkan kemaslahatan nyata di tengah masyarakat. Apabila dalam proses pilkada dirasakan masih minim partisipasi dan interaksi publik dengan kandidat seharusnya mejadi pekerjaan rumah bagi kelas sosial menengah untuk membuka ruang interaksi politik antara elite politik dengan masyarakat umum. Hal ini semata-mata agar pilkada tidak hanya sekedar mejadi panggung dan kesempatan elite politik, sekaligus pilkada benar-benar menjadi pesta rakyat, dimana rakyat dapat berpartisipasi secara aktif untuk menentukan peta politik dalam pilkada sesuai dengan kehendak dan aspirasi publik.

Selain memberikan ruang bagi partisipasi publik dalam proses pilkada, dengan sendirinya proses pembelajaran politik diatas dapat membuat proses demokratisasi politik di daerah mejadi lebih berkualitas.

Upaya reformasi yang menempatkan demokratisasi politik sebagai sebuah pilihan harus di kawal dalam pelaksanaannya. Momentum dan konsolidasi demokrasi melalui proses pilkada harus dengan sadar dipahami dan melahirkan sebuah pencerahan politik di tengah-tengah masyarakat. Sehingga demokrasi sebagai sebuah instrumen dan praktik dalam kehidupanberbangsa danbernegara semakin memiliki makna untuk menciptakan tata kehidupan yang lebih baik. Dengan harapan melalui proses di atas dapat melindungi seluruh kepentingan warga negara sekaligus memberikanbatasan dan kontrol bagi setiap penyelenggaraan pemerintahan.

Tidak dapat di pungkiri bahwa realitas politik di masyarakat, proses konsolidasi politik masih di dominasi oleh interaksi politik yang di bangun elit, sehingga ada kesenjangan politik yang membuat masyarakat cenderung di mobilisasi dan tidak dapat mandiri dalam menentukan pilihan politik. Padahal masyarakat memiliki hak dan kedaulatan politik yang di lindungi oleh konstitusi

Partisipasi politik yang merupakan peterjemahandari kedaulatan rakyat adalah

hal yang sangat fundamental dalam proses demokrasi. Ia memiliki makna yang penting dalam berlangsungnya sistem demokrasi. Apabila masyarakat memiliki tingkat partisipasi yang tinggi, maka proses pembangunan politik akanberjalan denganbaik, sehingga akanberarti pula terhadap perkembanganbangsa dannegara.

DAFTAR PUSTAKA

Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi Cetakan Kesembilan, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013

Anwar Arifin, Komunikasi Politik, Filsafat-Paradigma, Teori, Tujuan Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia, Graha Ilmu, Ypgyakarta, 2011

Makalah:

Saiful Arif, Partisipasi, Demokrasi dan Pembangunan dalam Partisipasi Warga Dalam Pembangunan dan Demokrasi. Program sekolah demokrasi Averous Press, Malang 2012. Badandiklat.jatengprov.go.id

Dokumentasi

(WWW.Kompas.Com, 19 November 2013).